



Kekuatan Kolaboratif antara Kelompok Guru dan Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar

Lilis Nurhalimah^{1*}, Evi Putri Meilina², Muhammad Lintang Fajar³,
Didik Tri Setiyoko⁴

¹⁻⁴Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

Email: lilishalimah777@gmail.com^{1*}, melly160505@gmail.com², flintang135@gmail.com³,
trisetiyokoumus@gmail.com⁴

*Penulis korespondensi: lilishalimah777@gmail.com

Abstract. *The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a national priority policy under the Prabowo–Gibran administration aimed at improving students' well-being and learning quality through school-based nutrition interventions. However, its effectiveness largely depends on the collaborative strength between teacher groups as field implementers and the government as policy makers. This study aims to analyze the collaborative synergy between teachers and the government in implementing MBG and to develop a conceptual model of school-based partnership. The study employs a Systematic Literature Review (SLR) method, reviewing national and international articles published between 2018 and 2024 using keywords “free nutritious meals”, “school feeding program”, “government collaboration”, and “primary school teachers”. Thematic analysis was conducted by categorizing findings into four main themes: the role of government, the role of teachers, collaborative implementation, and impact on students. The results show that the success of MBG depends on policy transparency, teacher training, and cross-sector coordination responsive to local conditions. This article contributes to constructing a conceptual collaborative model that positions teachers as policy mediators and social change agents in schools. The findings strengthen the concepts of collaborative governance and empowerment education within the context of educational nutrition policy in Indonesia.*

Keywords: *Education Governance; Free Nutritious Meal; Government Collaboration; Primary School Teachers; School Nutrition.*

Abstrak. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan prioritas nasional pemerintahan Prabowo–Gibran yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pembelajaran siswa melalui intervensi gizi di sekolah dasar. Namun, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kekuatan kolaboratif antara kelompok guru sebagai pelaksana lapangan dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi kolaboratif guru–pemerintah dalam pelaksanaan MBG serta merumuskan model konseptual kemitraan berbasis sekolah yang efektif. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap artikel nasional dan internasional terbitan 2018–2024, dengan kata kunci “makan bergizi gratis”, “school feeding program”, “kolaborasi pemerintah”, dan “guru sekolah dasar”. Analisis tematik dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam empat tema utama: peran pemerintah, peran guru, kolaborasi implementatif, dan dampak terhadap siswa. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan MBG ditentukan oleh transparansi kebijakan, pelatihan guru, serta koordinasi lintas sektor yang responsif terhadap kondisi lokal. Artikel ini berkontribusi dalam membangun model konseptual kolaboratif yang menempatkan guru sebagai penghubung kebijakan dan agen perubahan sosial di sekolah. Temuan ini memperkuat konsep collaborative governance dan empowerment education dalam konteks kebijakan gizi pendidikan di Indonesia.

Kata kunci: Governance Pendidikan; Guru Sekolah Dasar; Gizi Sekolah; Kolaborasi Pemerintah; Makan Bergizi Gratis.

1. PENDAHULUAN

Program *Makan Bergizi Gratis* (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka periode 2024–2029. Program ini muncul sebagai bagian dari visi besar “Indonesia Emas 2045” yang menekankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul, sehat, dan produktif sejak usia sekolah

dasar (Aji, 2025; Putra & Marsal, 2025). MBG bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik di berbagai jenjang pendidikan untuk mengatasi persoalan gizi kronis seperti stunting dan malnutrisi, yang selama ini menjadi tantangan serius dalam pembangunan pendidikan nasional (Kiftiyah et al., 2025).

Selain berdimensi kesehatan, kebijakan MBG juga memiliki relevansi kuat terhadap tujuan pendidikan dasar, yaitu membentuk peserta didik yang berkarakter, sehat jasmani, dan memiliki kemampuan belajar optimal. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian makanan bergizi di sekolah berdampak positif terhadap konsentrasi belajar, kehadiran siswa, dan capaian akademik, sehingga dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di sekolah dasar (Agustini, 2025). Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi kebijakan gizi, tetapi juga intervensi pendidikan yang berpotensi memperkuat kualitas pembelajaran dan pemerataan kesempatan belajar.

Dari sisi ekonomi dan sosial, program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, karena pengadaan bahan pangan diharapkan berasal dari produsen setempat, seperti petani, peternak, dan pelaku UMKM di daerah. Hal ini menjadikan MBG sebagai instrumen pembangunan sosial yang bersifat lintas sektor dan berorientasi pada partisipasi masyarakat (Agustini, 2025; Lendra, Husni, & Fitriani, 2025). Dengan pelibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sekolah, guru, hingga masyarakat, keberhasilan MBG bergantung pada tingkat kolaborasi antarsektor yang kuat.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi program MBG masih menghadapi tantangan serius. Di antaranya adalah ketidaksiapan infrastruktur pendukung, ketidaksesuaian standar gizi, distribusi yang belum merata, serta keterbatasan koordinasi lintas lembaga (Rosidin, Maulana, & Dharmawan, 2025). Di sisi lain, persoalan anggaran juga menjadi isu krusial, mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini secara nasional, yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah per hari (Aji, 2025). Hal ini menimbulkan perdebatan publik terkait efektivitas, keberlanjutan, dan dasar hukum pelaksanaannya (Putra & Marsal, 2025).

Dalam konteks implementasi di sekolah dasar, peran kelompok guru menjadi sangat penting sebagai pelaksana teknis di lapangan. Guru berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program di tingkat sekolah. Kolaborasi antara pemerintah dan kelompok guru dapat menjadi kekuatan strategis dalam memastikan bahwa program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran (Albaburrahim et al., 2025). Guru tidak hanya bertanggung jawab dalam pendistribusian makanan, tetapi juga dalam pendidikan gizi kepada peserta didik serta pengawasan kualitas pelaksanaan di lingkungan sekolah.

Lebih jauh lagi, efektivitas program MBG juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) dalam bidang pendidikan. Implementasi program ini perlu mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, partisipasi, dan responsivitas agar mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi peserta didik (Lendra et al., 2025). Dengan demikian, MBG bukan hanya kebijakan teknis untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga wujud nyata komitmen negara dalam membangun pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, penting untuk meninjau bagaimana kekuatan kolaboratif antara kelompok guru dan pemerintah berperan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di sekolah dasar. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan dan gizi, serta menjadi dasar konseptual bagi penguatan tata kelola program di masa depan.

Meskipun Program *Makan Bergizi Gratis* (MBG) telah dirancang sebagai strategi nasional untuk meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan anak Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya, terutama pada aspek kolaborasi antara pemerintah dan kelompok guru sebagai pelaksana utama di sekolah dasar (Rosidin, Maulana, & Dharmawan, 2025; Albaburrahim et al., 2025). Program MBG kerap dipandang sebagai kebijakan administratif yang bersifat top-down, di mana peran guru hanya sebatas pelaksana teknis di lapangan tanpa dilibatkan secara aktif dalam tahap perencanaan, pengawasan, dan evaluasi (Aji, 2025; Lendra, Husni, & Fitriani, 2025).

Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan konseptual dalam memahami bagaimana sinergi antara kelompok guru dan pemerintah dapat membentuk *kekuatan kolaboratif* yang berkelanjutan. Padahal, guru memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di tingkat sekolah dasar. Peran mereka bukan hanya dalam memastikan distribusi makanan berjalan dengan baik, tetapi juga dalam melakukan edukasi gizi, pengawasan mutu, serta membangun partisipasi komunitas sekolah (Agustini, 2025).

Tanpa kolaborasi yang kuat dan saling memperkuat antara pemerintah dan kelompok guru, program MBG berisiko menjadi sekadar rutinitas administratif yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas belajar anak, kesejahteraan siswa, maupun pemberdayaan masyarakat lokal (Putra & Marsal, 2025). Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang menyoroti mekanisme kolaboratif dan peran strategis guru dalam konteks kebijakan lintas sektor seperti MBG, agar implementasi program ini benar-benar berdaya guna bagi pembangunan pendidikan dasar di Indonesia.

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama, yakni teori *collaborative governance* dan teori *empowerment* dalam konteks pendidikan. Pertama, teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008) menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan publik dalam sistem pemerintahan modern bergantung pada kemampuan aktor-aktor lintas sektor, terutama pemerintah dan masyarakat, untuk berkolaborasi melalui proses komunikasi, partisipasi, dan kepercayaan timbal balik. Dalam konteks MBG, teori ini menyoroti bagaimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan guru sebagai pelaksana lapangan perlu membangun hubungan kolaboratif yang berbasis transparansi dan saling kepercayaan agar kebijakan gizi sekolah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan (Kiftiyah et al., 2025; Lendra et al., 2025).

Kedua, teori *empowerment* dalam pendidikan (Zimmerman, 1995) memandang guru sebagai agen perubahan yang perlu diberdayakan agar mampu mengambil keputusan secara mandiri dan berkontribusi aktif dalam pengelolaan program sekolah. Dalam implementasi MBG, pemberdayaan kelompok guru penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menumbuhkan tanggung jawab moral dan profesional terhadap kesejahteraan siswa (Agustini, 2025; Albaburrahim et al., 2025).

Selain itu, penelitian internasional oleh WHO (2021) dan UNESCO (2019) menunjukkan bahwa program makan bergizi di sekolah (*school feeding programs*) di berbagai negara terbukti meningkatkan kehadiran, konsentrasi, serta prestasi akademik siswa. Laporan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program bergizi di sekolah sangat ditentukan oleh keterlibatan guru dan dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten serta lintas sektor antara pendidikan dan kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan kolaboratif antara kelompok guru dan pemerintah dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di sekolah dasar berdasarkan hasil kajian pustaka. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kolaborasi tersebut, serta menguraikan model konseptual kemitraan antara pemerintah dan guru yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan MBG sebagai kebijakan pendidikan dan gizi nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur (*literature review*) dengan jenis penelitian *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kolaborasi antara kelompok guru dan pemerintah dalam implementasi *Program Makan Bergizi Gratis* (MBG) di sekolah dasar, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode SLR

memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai penelitian yang relevan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat menghasilkan pemahaman konseptual yang mendalam serta model kolaboratif yang berlandaskan data ilmiah (Kiftiyah et al., 2025; Lendra, Husni, & Fitriani, 2025).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan antara tahun 2018 hingga 2024. Artikel-artikel tersebut diperoleh melalui penelusuran di berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, SINTA, Scopus, dan *ScienceDirect*. Sumber nasional diambil dari jurnal-jurnal bereputasi yang terindeks SINTA, sementara sumber internasional mencakup publikasi dari jurnal bereputasi *Scopus* serta laporan lembaga dunia seperti WHO dan UNESCO yang berfokus pada kebijakan pendidikan dan gizi sekolah. Strategi penelusuran dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci dalam dua bahasa, yaitu “*makan bergizi gratis*”, “*school feeding program*”, “*guru sekolah dasar*”, “*kolaborasi pemerintah*”, dan “*education governance*”. Penggunaan kata kunci bilingual ini bertujuan memperluas cakupan pencarian agar mencakup konteks nasional maupun global dalam implementasi program gizi di lingkungan sekolah dasar.

Proses penelusuran dan seleksi artikel dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah identifikasi artikel yang relevan dengan topik penelitian melalui pencarian menggunakan kata kunci yang telah ditentukan. Selanjutnya dilakukan tahap seleksi dengan meninjau abstrak dan isi artikel untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Artikel yang memenuhi kriteria inklusi dipertahankan, sedangkan artikel yang bersifat opini, berita, atau tidak memiliki metodologi ilmiah yang jelas dieliminasi. Setelah itu, setiap artikel terpilih dievaluasi kualitasnya berdasarkan kejelasan metodologi, kesesuaian topik, serta kontribusinya terhadap pemahaman kolaborasi antara pemerintah dan guru dalam pelaksanaan program gizi sekolah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan tematik (*thematic analysis*). Melalui pendekatan ini, literatur yang telah dikumpulkan dikategorikan ke dalam empat tema utama, yaitu peran guru, kebijakan pemerintah, kolaborasi implementatif, dan dampak terhadap siswa. Tema pertama menyoroti bagaimana guru berperan sebagai pelaksana teknis dan agen edukasi gizi di sekolah dasar. Tema kedua membahas kebijakan pemerintah yang menjadi kerangka utama pelaksanaan MBG, termasuk dukungan regulasi dan pendanaan. Tema ketiga menyoroti dinamika kolaborasi antara pemerintah dan kelompok guru dalam proses implementasi di lapangan, sedangkan tema keempat mengulas dampak program terhadap kesehatan, motivasi belajar, dan prestasi akademik siswa.

Hasil analisis dari berbagai sumber literatur tersebut kemudian disintesis untuk membangun model konseptual kekuatan kolaboratif antara kelompok guru dan pemerintah dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di sekolah dasar. Model ini diharapkan mampu memberikan pemahaman teoretis yang lebih utuh mengenai mekanisme kerja sama lintas sektor dalam kebijakan pendidikan dan gizi nasional, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan strategi kebijakan yang lebih partisipatif, efektif, dan berkelanjutan di masa depan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam Kebijakan Gizi Sekolah

Program *Makan Bergizi Gratis (MBG)* yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan salah satu agenda prioritas nasional 2024–2029, dengan tujuan utama memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan gizi peserta didik di jenjang pendidikan dasar. Pemerintah berperan sebagai penyedia sumber daya, pengatur kebijakan, dan koordinator lintas sektor antara bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Merlinda dan Yusuf (2025), program ini didasarkan pada realitas bahwa sekitar 41% siswa di Indonesia masih belajar dalam kondisi lapar, yang berdampak negatif terhadap konsentrasi dan prestasi akademik mereka. Melalui MBG, pemerintah berupaya menghadirkan keadilan sosial dengan memberikan akses gizi berkualitas kepada seluruh anak Indonesia tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Dukungan anggaran juga menjadi indikator kuatnya komitmen negara terhadap peningkatan kesejahteraan pelajar. Pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun dalam Rancangan APBN 2025 untuk tahap awal program ini, yang mencakup siswa sekolah dasar, balita, ibu hamil, dan menyusui (Tambunan et al., 2025). Langkah ini mencerminkan penerapan pendekatan rasionalisme dalam kebijakan publik, sebagaimana dijelaskan oleh Khatimah, Kamaruddin, dan Awaru (2025), bahwa kebijakan publik yang efektif harus bersandar pada data dan argumentasi rasional untuk mencapai efisiensi dan keadilan sosial.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan pelaksanaan di lapangan (*policy-to-practice gap*). Studi Orbawati et al. (2025) di Magelang menunjukkan bahwa implementasi MBG di daerah menghadapi kendala variasi menu, pasokan bahan pangan, serta lemahnya mekanisme evaluasi gizi. Walau demikian, peluang penguatan terbuka melalui pemberdayaan koperasi, literasi gizi di sekolah, dan partisipasi masyarakat lokal dalam rantai distribusi bahan pangan. Pengalaman ini serupa dengan implementasi *School Feeding*.

Program di beberapa negara Afrika seperti Ghana dan Tanzania, di mana keterlibatan pemerintah lokal dan petani menjadi faktor keberhasilan distribusi makanan sehat di sekolah (Khonsa et al., 2025). Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi penyedia dana, tetapi juga *policy orchestrator* yang menghubungkan berbagai aktor lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan program gizi sekolah.

Temuan serupa juga disampaikan oleh Bundy et al. (2019) yang menunjukkan adanya pergeseran paradigma global dalam program kesehatan dan gizi sekolah. Fokus kebijakan tidak lagi sekadar pada penanganan medis, tetapi telah bergeser menjadi upaya pembangunan sosial yang menargetkan kelompok miskin, perempuan, dan anak-anak rentan melalui intervensi gizi berbasis sekolah. Pemerintah di berbagai negara kini memanfaatkan sistem pendidikan sebagai sarana paling efisien untuk menyalurkan layanan gizi, mengingat sekolah memiliki jangkauan yang lebih luas dibanding sistem kesehatan.

Kekuatan Kelompok Guru dalam Implementasi Program

Kelompok guru memiliki posisi strategis sebagai pelaksana langsung di sekolah dan sebagai penggerak perubahan dalam komunitas pendidikan. Menurut Arifin, Rifa'i, dan Pratama (2025), guru tidak hanya berperan dalam mendistribusikan makanan bergizi, tetapi juga mengintegrasikan edukasi gizi ke dalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah. Melalui peran ini, guru menjadi agen penting dalam membangun kesadaran gizi, karakter, dan nilai-nilai kebersamaan di kalangan siswa. Temuan tersebut sejalan dengan teori empowerment dalam pendidikan oleh Zimmerman (1995) yang menekankan bahwa guru yang diberdayakan memiliki kapasitas untuk mendorong perubahan positif di lingkungan sosialnya.

Keterlibatan guru dalam MBG juga memperkuat hubungan sosial di komunitas sekolah. Sebagaimana diungkap oleh Herniati (2025), partisipasi guru dalam program gizi meningkatkan kehadiran dan minat belajar siswa, karena anak-anak merasa lebih diperhatikan secara emosional dan fisik. Guru berperan sebagai figur yang menanamkan kebiasaan makan sehat dan disiplin hidup bersih, sekaligus mengawasi kondisi kesehatan siswa sehari-hari. Dalam konteks sosial, guru juga mampu memobilisasi dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar untuk menjaga keberlanjutan program.

Meski demikian, beberapa tantangan muncul di lapangan, antara lain meningkatnya beban kerja administratif, keterbatasan pelatihan gizi, serta minimnya dukungan struktural dari pemerintah daerah. Ridwan, Maesaroh, dan Sari (2024) menyoroti potensi ketidakseimbangan anggaran, di mana prioritas program makan gratis terkadang mengurangi dana untuk peningkatan kompetensi guru atau fasilitas belajar. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas guru

melalui pelatihan gizi dan manajemen program menjadi hal mendesak agar mereka tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga pengawas dan evaluator program gizi sekolah.

Kolaborasi Pemerintah–Guru sebagai Kekuatan Kolektif

Keberhasilan program gizi sekolah sangat bergantung pada kualitas kolaborasi antara pemerintah dan guru. Menurut kerangka Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008), kerja sama lintas aktor yang efektif ditandai oleh komunikasi dua arah, transparansi kebijakan, serta kejelasan peran dan tanggung jawab. Dalam konteks MBG, pemerintah berperan menetapkan arah kebijakan dan dukungan administratif, sementara guru dan kepala sekolah menjadi penggerak implementasi di tingkat akar rumput.

Kolaborasi yang kuat memerlukan dukungan pelatihan dan monitoring berbasis sekolah. Studi Khonsa et al. (2025) menegaskan bahwa program nutrisi yang terintegrasi ke dalam sistem pendidikan formal, seperti *School Feeding Program* di Jepang dan Finlandia, menunjukkan hasil optimal karena guru tidak hanya membagikan makanan tetapi juga mengajarkan nilai-nilai gizi, keberlanjutan pangan, dan solidaritas sosial di kelas. Di kedua negara tersebut, guru dilatih untuk memahami aspek nutrisi dasar dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan sekolah, sehingga tercipta integrasi antara kebijakan, edukasi, dan praktik.

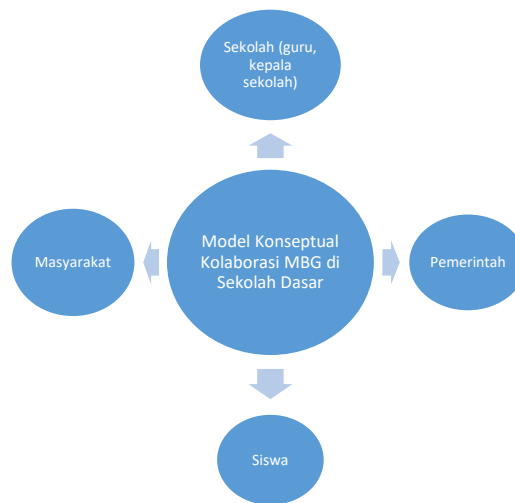
Dalam konteks global, Bundy et al. (2019) melalui kerangka *FRESH (Focusing Resources on Effective School Health)* menegaskan bahwa keberhasilan program gizi sekolah bergantung pada kemitraan strategis antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif lintas sektor ini terbukti meningkatkan efektivitas program serta memperluas jangkauan layanan kesehatan dan gizi di sekolah-sekolah, terutama di negara berkembang. Prinsip yang sama dapat diadaptasi pada implementasi MBG di Indonesia untuk memperkuat sinergi antaraktor pendidikan dan memastikan keberlanjutan program.

Kolaborasi semacam ini dapat direplikasi melalui pendekatan pemberdayaan sekolah (*school-based management*), di mana kepala sekolah dan guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan mekanisme pelaksanaan MBG dengan kebutuhan lokal. Orbawati et al. (2025) menyarankan adanya *feedback loop* antara sekolah dan pemerintah daerah agar kebijakan tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga responsif terhadap tantangan di lapangan. Dengan komunikasi yang terbuka dan kepercayaan timbal balik, kolaborasi pemerintah–guru dapat menjadi kekuatan kolektif dalam mewujudkan program gizi yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas belajar siswa.

Model Konseptual Kolaborasi MBG di Sekolah Dasar

Berdasarkan hasil kajian literatur, terbentuk model konseptual yang menggambarkan hubungan sinergis antara empat aktor utama dalam pelaksanaan program MBG: pemerintah,

sekolah (guru dan kepala sekolah), masyarakat, dan siswa. Secara konseptual, alur kolaborasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur kolaborasi.

Pemerintah menyediakan kerangka kebijakan, anggaran, dan regulasi lintas sektor. Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis, distribusi makanan, serta edukasi gizi di lingkungan belajar. Masyarakat berperan dalam dukungan sosial, seperti menyediakan bahan pangan lokal dan memastikan keberlanjutan logistik. Sementara itu, siswa menjadi penerima manfaat utama yang mengalami peningkatan status gizi, konsentrasi belajar, dan motivasi akademik (Saadah et al., 2025; Merlinda & Yusuf, 2025).

Keterpaduan keempat aktor ini menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan produktif. Berdasarkan teori empowerment education (Zimmerman, 1995), kolaborasi tersebut tidak hanya memperbaiki aspek fisik dan akademik siswa, tetapi juga membentuk karakter sosial yang kuat. Selain itu, model ini sejalan dengan temuan Khonsa et al. (2025) yang menegaskan bahwa program nutrisi sekolah berpotensi menjadi bagian dari *manajemen pendidikan nasional* apabila diintegrasikan secara formal ke dalam perencanaan, anggaran, serta sistem evaluasi sekolah.

Kolaborasi antara pemerintah dan kelompok guru dalam implementasi MBG di sekolah dasar merupakan manifestasi dari kekuatan kolektif bangsa dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari seberapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi sejauh mana kolaborasi lintas sektor dapat mengubah budaya sekolah menuju keberlanjutan pendidikan yang sehat dan inklusif.

4. KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas *Program Makan Bergizi Gratis (MBG)* di sekolah dasar sangat bergantung pada kekuatan kolaboratif antara kelompok guru dan Pemerintah sebagai aktor utama dalam tata kelola pendidikan gizi nasional. Pemerintah memiliki peran strategis sebagai penyedia kebijakan, sumber daya, dan regulasi lintas sektor, sementara guru berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan dengan praktik di lapangan. Dalam pelaksanaan MBG, guru tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pendidik dan agen sosial yang membentuk budaya makan sehat di sekolah. Sinergi antara kedua pihak tersebut mencerminkan prinsip *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008) yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah, transparansi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi yang efektif juga memerlukan sistem pelatihan dan pengawasan berbasis sekolah agar implementasi program tidak sekadar administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan gizi, kesehatan, dan motivasi belajar siswa. Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari keberhasilan distribusi makanan bergizi, melainkan dari sejauh mana program ini mampu memperkuat ekosistem pendidikan yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis dengan menyajikan sintesis literatur yang membangun model kolaboratif guru–pemerintah dalam konteks implementasi MBG di pendidikan dasar. Model ini memperlihatkan bagaimana pelaksanaan program gizi sekolah dapat menjadi instrumen penguatan sistem pendidikan melalui pemberdayaan guru, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat. Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan konseptual yang menempatkan guru bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi sebagai *co-creator* dalam kebijakan publik pendidikan gizi, sehingga membuka peluang untuk membangun manajemen pendidikan yang lebih partisipatif dan berbasis bukti. Berdasarkan temuan literatur, disarankan agar pemerintah merancang panduan implementasi MBG berbasis sekolah yang memuat mekanisme pelatihan guru, pedoman koordinasi antarsektor, dan sistem evaluasi berbasis data. Panduan ini perlu menyesuaikan karakteristik daerah serta kapasitas sumber daya sekolah agar kebijakan dapat berjalan secara inklusif dan berkeadilan. Selain itu, penelitian selanjutnya perlu melakukan uji lapangan terhadap model kolaboratif yang diusulkan dalam artikel ini untuk menilai efektivitasnya dalam konteks nyata. Uji empiris tersebut diharapkan mampu memberikan bukti tambahan mengenai bagaimana interaksi antara guru, pemerintah, dan masyarakat dapat memperkuat dampak program MBG terhadap peningkatan gizi, motivasi belajar, dan prestasi akademik siswa sekolah dasar. Dengan langkah tersebut, kolaborasi lintas sektor dalam pendidikan dapat

berkembang menjadi model keberlanjutan yang menyehatkan dan mencerdaskan generasi penerus bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Didik Tri Setiyoko, M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS SD dan pembimbing dalam penulisan artikel ini, atas bimbingan, inspirasi, dan dukungan akademik yang telah diberikan selama proses penelitian dan penulisan. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh tim peneliti dan pihak yang telah membantu dalam penyediaan sumber literatur serta memberikan masukan yang berharga, sehingga artikel ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, U. (n.d.). Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>
- Aji, W. T. (2025). Makan bergizi gratis di era Prabowo–Gibran: Solusi untuk rakyat atau beban baru? *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(3), 215–226.
- Albaburrahim, A., Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program makan bergizi gratis: Analisis kritis transformasi pendidikan Indonesia menuju Generasi Emas 2045. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 767–780. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19191>
- Arifin, M. N., Rifa'i, M., & Pratama, H. D. (2025). Perspektif guru terhadap program makan bergizi dalam meningkatkan kualitas warga negara. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 20–25.
- Bundy, D., Shaeffer, S., Jukes, M., Beegle, K., Gillespie, A., Drake, L., & Wright, C. (2006). School-based health and nutrition programs. Dalam D. T. Jamison et al. (Eds.), *Disease control priorities in developing countries* (2nd ed.). World Bank.
- Herniati, N. (2025). Efektivitas program pemerintah MBG (makan bergizi gratis) terhadap minat belajar anak usia dini. *Jurnal Pendidikan AURA (Anak Usia Raudhatul Athfal)*, 6(1), 88–98.
- Khatimah, A. W. N., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Rasionalisme dalam kebijakan publik: Analisis dampak program makan bergizi gratis terhadap kesejahteraan pelajar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 1969–1976. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.815>

- Khonsa, N., Khalifah, H., Zulaikha, S., & Takdir, M. (2025). Integrasi program nutrisi gratis dalam pendidikan sebagai komponen manajemen pendidikan nasional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5474–5482. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1441>
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Lendra, I. W., Husni, D., & Fitriani, Y. (2025). Kebijakan makan bergizi gratis dan relevansinya terhadap nilai-nilai good governance: Analisis kualitatif dalam administrasi publik. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 937–945. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1252>
- Merlinda, A. A., & Yusuf, Y. (2025). Analisis program makan gratis Prabowo Subianto terhadap strategi peningkatan motivasi belajar siswa di sekolah: Tinjauan sosiologi pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1364–1373. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1360>
- Orbawati, E. B., Mukti, A., Aufa, R., Karunia, I., & Ikhtiara, S. (2025). Policy to practice gap dalam program makan bergizi gratis: Studi SWOT di Magelang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(4), 797–810.
- Putra, S. F., & Marsal, I. (2025). Politik hukum kebijakan makan bergizi gratis: Pembebanan APBN atau menuju Indonesia Emas 2045. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(5), 7106–7120.
- Ridwan, M., Maesaroh, S., & Sari, S. W. (2024). Pengaruh alokasi pajak untuk program makan gratis terhadap kualitas pendidikan: Studi kuantitatif di sekolah dasar Kota Cirebon. *Journal Central Publisher*, 2(8), 2363–2371. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i8.490>
- Rosidin, A., Maulana, J., & Dharmawan, A. (2025). Tantangan dan strategi implementasi program makan bergizi gratis: Studi kasus pemerintah daerah Provinsi Banten. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 3(2), 131–143.
- Saadah, D. A., Hafni, N. D., & Huda, M. (2025). Pengaruh program makan bergizi gratis terhadap perkembangan fisik anak usia dini. *WALADI*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.61815/waladi.v3i1.679>
- Tambunan, K. A. H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin, J. (2025). Tinjauan kritis tentang program makan bergizi gratis terhadap produktivitas belajar siswa. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 2(2), 21–31. <https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1428>